

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Berlipat Dana Darurat Corona

Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan Rp 7,6 triliun untuk jaring pengaman social.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan Rp 10,78 triliun atau sekitar 12,3 persen dari total anggaran daerah untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Jumlah itu naik dari perhitungan awal, yakni Rp 10,64 triliun.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan bahwa dana penanganan Covid-19 DKI itu bukan angka final. "DKI masih bisa melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya kepada *Tempo*, kemarin.

Anggaran daerah untuk penanggulangan wabah *corona* oleh DKI terus meningkat. Awalnya, Gubernur Anies Baswedan menyatakan pemerintah provinsi menyediakan Rp 3,03 triliun yang mereka alokasikan sampai Mei mendatang. "Kalau berkepanjangan, kami tambah lagi," kata Anies saat rapat melalui konferensi video bersama Wakil Presiden Maruf Amin pada 2 April lalu.

Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, dari Rp 10,78 triliun yang dianggarkan pemerintah DKI, Rp 7,6 triliun atau 70 persennya digunakan untuk jaring pengaman sosial. Adapun dana yang disediakan untuk penanganan kesehatan, termasuk penyediaan alat pelindung diri, sebesar Rp 2,67 triliun atau 24,8 persen.

Per 9 April lalu, pemerintah DKI Jakarta mulai menyalurkan bantuan sosial untuk 1,2 juta keluarga miskin dan rentan miskin yang terimbas pandemi Covid-19. Bahan pokok plus masker senilai Rp 600 ribu per bulan itu diberikan secara bertahap, yakni dalam empat paket dengan nilai tiap paket Rp 149.500.

Ardian mengatakan, meski realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta itu tidak harus melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan berarti badan legislatif tidak bisa ikut memantau penggunaannya. "DPRD harus tetap ikut mengawasi sesuai dengan ketentuan undang-undang," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji langkah Anies cs dalam merealokasi anggaran daerah untuk menanggulangi Covid-19. "Dalam catatan kami, DKI salah satu daerah yang paling aktif dan agresif dalam realokasi anggaran," ujarnya dalam telekonferensi musyawarah perencanaan pembangunan pada Kamis pekan lalu.

Tito mengungkapkan pemerintah DKI menunda hampir semua belanja modal untuk tahun ini demi mengatasi Covid-19. Meski demikian, realokasi anggaran daerah Jakarta tetap memperhatikan sektor penting, seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Termasuk program prioritas lainnya, yaitu antisipasi banjir dan penanggulangan kemacetan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta Edi Sumantri belum memberikan penjelasan terkait dengan realokasi anggaran daerah itu. Pertanyaan *Tempo* tak kunjung dijawab hingga tenggat tulisan usai malam tadi.

Sebelumnya, Edi menjelaskan, pemerintah DKI menambah anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 sebesar Rp 3,03 triliun dari dana Formula E dan pengadaan tanah. "Alokasi

anggaran itu berasal dari pemanfaatan belanja tidak terduga, penundaan sejumlah penanaman modal daerah, anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E, dan penundaan pembelian tanah," tuturnya seperti dalam siaran pers pada 2 April lalu.

Dana itu, Edi melanjutkan, dialokasikan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah lain terkait dengan penanganan pandemi virus *corona*. Pemerintah DKI akan kembali menambah anggaran itu jika pagelbruk masih terus berlangsung setelah Mei.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jakarta Abdurrahman Suhaimi akan mengundang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Jakarta untuk meminta penjelasan mata anggaran mana saja yang akan dialihkan untuk menambah dana penanggulangan Covid-19 itu. Badan Anggaran ingin mengetahui kekuatan APBD DKI di tengah pandemi ini karena pendapatan daerah juga diperkirakan akan meleset. "Jangan sampai hanya mengalokasikan, tapi ternyata uangnya enggak ada," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

● TAUFIQ SIDDIQ